

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mempunyai korelasi positif terhadap peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Beragam aktivitas sosial ekonomi masyarakat memunculkan sejumlah sampah non konvensional yang pada gilirannya akan bermuara pada ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem.

Besarnya beban pengelolaan sampah khususnya di kawasan perkotaan dan belum optimalnya pengelolaan sampah yang menggunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi dan sehat bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya menindaklanjuti amanat Undang-undang tersebut dengan mengeluarkan kebijakan pengelolaan TPA di perkotaan dengan menggunakan TPA Regional karena banyaknya fenomena keterbatasan lahan TPA di kota besar dan metropolitan. Selain itu Pemerintah Pusat dan Provinsi juga mendorong kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu.

Upaya fasilitasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam menggalang kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di lapangan mengalami beberapa kendala. Kendala yang cukup menonjol antara lain sulitnya membangun kesepakatan dalam kerjasama pengelolaan TPA Regional dan belum terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), padahal kedua hal tersebut

menjadi prasyarat untuk menjalin kerjasama yang luas khususnya dengan swasta dan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan Kajian Pengelolaan Sampah antar Wilayah Kabupaten/Kota ini untuk mewujudkan kerjasama pengelolaan sampah secara terpadu antara Pemerintah Kabupaten – Kota Mojokerto dan Kabupaten – Kota Pasuruan melalui pembuatan TPA Regional.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tata kelola sampah dan permasalahannya mulai tahap pewadahan, tahap pengumpulan, tahap pengangkutan dan tahap pembuangan di lokasi penelitian?
- b. Bagaimana persepsi para pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tentang rencana Pengelolaan Sampah Terpadu dengan menggunakan TPA Regional antara Pemerintah Kabupaten – Kota Mojokerto dan Pemerintah Kabupaten – Kota Pasuruan?
- c. Belum diketahuinya teknologi spesifik lokal yang berkembang di masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah di lokasi penelitian;
- d. Belum tersedianya sistem pengelolaan sampah terpadu dengan menggunakan TPA Regional antara Pemerintah Kabupaten – Kota Mojokerto dan Pemerintah Kabupaten – Kota Pasuruan.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui tata kelola sampah dan permasalahannya mulai tahap pewadahan, tahap pengumpulan, tahap pengangkutan dan tahap pembuangan di lokasi penelitian;
- b. Mengetahui persepsi para pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tentang rencana Pengelolaan Sampah Terpadu dengan menggunakan TPA Regional antara Pemerintah Kabupaten – Kota Mojokerto dan Pemerintah Kabupaten – Kota Pasuruan;

- c. Mengetahui teknologi spesifik lokal yang berkembang di masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah di lokasi penelitian;
- d. Merencanakan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan menggunakan TPA Regional antara Pemerintah Kabupaten – Kota Mojokerto dan Pemerintah Kabupaten – Kota Pasuruan.

1.4 Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Diketuainya tata kelola sampah dan permasalahannya mulai tahap pewadahan, tahap pengumpulan, tahap pengangkutan dan tahap pembuangan di lokasi penelitian;
- b. Diketuainya persepsi para pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tentang rencana Pengelolaan Sampah Terpadu dengan menggunakan TPA Regional antara Pemerintah Kabupaten – Kota Mojokerto dan Pemerintah Kabupaten – Kota Pasuruan;
- c. Diketuainya teknologi spesifik lokal yang berkembang di masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah di lokasi penelitian;
- d. Tersusunnya sistem pengelolaan sampah terpadu dengan menggunakan TPA Regional antara Pemerintah Kabupaten – Kota Mojokerto dan Pemerintah Kabupaten – Kota Pasuruan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

- a. Identifikasi tata kelola sampah dan permasalahannya mulai tahap pewadahan, tahap pengumpulan, tahap pengangkutan dan tahap pembuangan di lokasi penelitian;
- b. Identifikasi persepsi para pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tentang rencana Pengelolaan Sampah Terpadu dengan menggunakan TPA

Regional antara Pemerintah Kabupaten – Kota Mojokerto dan Pemerintah Kabupaten – Kota Pasuruan;

- c. Identifikasi teknologi spesifik lokal yang berkembang di masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah di lokasi penelitian;
- d. Penyusunan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan menggunakan TPA Regional antara Pemerintah Kabupaten – Kota Mojokerto dan Pemerintah Kabupaten – Kota Pasuruan.